



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

Jl. Yos Sudarso No. 18 - 22 Telp. (031) 5463551 Fax. (031) 5463547 Surabaya

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 52 TAHUN 2014

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah harus dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) , ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Legislasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 4);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 50 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

- Memperhatikan :**
1. Surat Walikota Surabaya Nomor 180/3929/436.1.2/2014 tanggal 8 Agustus 2014 Perihal Penyampaian Daftar Rancangan Peraturan Daerah Program Legislasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2015.
 2. Hasil Rapat Badan Legislasi DPRD Kota Surabaya, Sekretaris DPRD dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Surabaya tanggal 5 Agustus 2014.
 3. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya tanggal 12 Agustus 2014.
 4. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya tanggal 15 Agustus 2014

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015**

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KOTA SURABAYA
 NOMOR : 52 TAHUN 2014
 TANGGAL : 15 Agustus 2014

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	Ket.
			Baru	Ubah		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	V		1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 3. Dinas Tenaga Kerja; 4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 5. Kantor Imigrasi; 6. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;	DPRD
2	Raperda tentang Upaya Kesehatan Daerah	Raperda tentang Upaya Kesehatan Daerah	V		Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	V		1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.	DPRD
3	Raperda tentang Penyertaan Modal kepada PT. BPR. Surya Artha Utama	Raperda tentang Penyertaan Modal kepada PT. BPR. Surya Artha Utama	V		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Badan Koordinasi dan Pelayanan Penanaman Modal; 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;	DPRD
4	Raperda tentang Penyertaan Modal kepada PT. BPR. Jatim	Raperda tentang Penyertaan Modal kepada PT. BPR. Jatim	V		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Badan Koordinasi dan Pelayanan	DPRD

									Penanaman Modal; 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;	
5	Raperda tentang Penataan Pasar Tradisional	Raperda tentang Penataan Pasar Tradisional	V		Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	V			1. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 2. PD Pasar Surya.	DPRD
6	Raperda tentang Izin Mendirikan Reklame dan Pajak Reklame	Raperda tentang Izin Mendirikan Reklame dan Pajak Reklame	V		Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	V			1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; 4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.	DPRD
7	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing Indonesia	Pemungutan Retribusi terhadap Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing Indonesia	V		1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	V			1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 3. Dinas Tenaga Kerja; 4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 5. Kantor Imigrasi; 6. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;	
8	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Surabaya	V		1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan				1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Badan Lingkungan Hidup.	

					Sumber Daya Air; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air				
9	Pengelolaan dan Perlindungan Air Tanah	Pengelolaan dan Perlindungan Air Tanah	V		1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Badan Lingkungan Hidup; 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;	
10	Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga	Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan	V		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 3. Kecamatan; 4. Kelurahan	

	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	V	1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya; 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor; 4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor KM.551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor KM.191/MPP/Kep/6/2001.	V	1. Dinas Perhubungan; 2. Badan Lingkungan Hidup; 3. Badan Perencanaan Pembangunan.
12	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7	Penyempurnaan pedoman dalam Penyelenggaraan	V	1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang	V	Dinas Perhubungan.

	tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum	Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum			Angkutan Jalan; 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum				
13	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Penyesuaian tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya		V				V	1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
14	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Penambahan obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			V	1. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
15	Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya	Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal		V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Badan Koordinasi dan Pelayanan Penanaman Modal; 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
16	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Pemungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	V		Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V		1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
17	Pembangunan Jaringan	pelaksanaan dan	V		Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun		V		1. Badan Perencanaan Pembangunan;

	Utilitas Terpadu di Kota Surabaya	pengendalian pembangunan jaringan utilitas di Kota Surabaya			2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010			2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; 3. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.	
18	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surabaya	Pedoman dalam menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surabaya	V		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 3. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; 4. Bagian Perlengkapan.	
19	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	Penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	
20	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah	Penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	
21	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Penetapan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	V		Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	V		1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;	
22	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan serta Pusat Perbelanjaan	Mencabut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan serta Pusat Perbelanjaan	V				V	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

	Pasar Turi	Pasar Turi								
23	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya	Penyempurnaan tujuan, kinerja dan organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat		V				V	1. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah; 2. Perusahaan Daerah Pasar Surya;	
24	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada	V		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011		V		1. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah; 2. Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada.	
25	Zonasi Pesisir Kota Surabaya	Zonasi Pesisir Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
26	Pemberian Nama Jalan, tempat Rekreasi, Taman dan Tempat Lain untuk Jalan	Pemberian Nama Jalan, tempat Rekreasi, Taman dan Tempat Lain untuk Jalan	V				V		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	
27	Rumah Susun	Pengaturan Rumah Susun	V		Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun		V		1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah;	
28	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Penambahan obyek retribusi Izin Mendirikan Bangunan		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			V	1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.	
29	Rencana Detail Tata Ruang Kota	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota	V		Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang		V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Cipta	

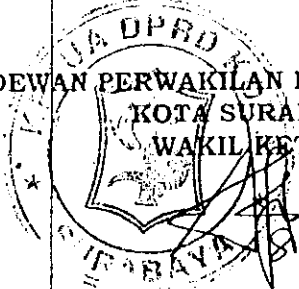
30	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman		V				V	Karya dan Tata Ruang; 1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; 3. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
31	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	V				V		1. Badan Lingkungan Hidup; 2. Dinas Kebakaran; 3. Dinas Perhubungan; 4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; 6. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA

32	1	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat putusan Mahkamah Agung	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah								
	3	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri/Gubernur Jawa Timur								

Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat perintah dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SURABAYA, 15 AGUSTUS 2014



DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH
KOTA SURABAYA
WAKIL KETUA

AKHMAD SUYANTO